

**PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN PINJAMAN DAN
PENERIMAAN ANGSURAN DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN DITAATINYA KEBIJAKAN
MANAJEMEN**

(Studi Kasus pada PT. Sumber Nasional Motor di Bandar Lampung)

Herry Goenawan Soedarsa

Henny

Haninun

Abstract

The purpose of this study was to assess the procedures for granting loans and installment receipts from customers on PT National Sources Motors, to assess the extent of the workings of the employees in the procedures for granting loans and installment receipts from customers on PT. National sources motors, to study the division of labor system imposed by PT. National Sources Motors and its application in lending procedures and installment receipts (whether or not adhered to company policy), and to compare between the existing theory and practice in lapangan.alat analysis is qualitative analysis tool. Qualitative analysis is a tool used analysis tool by comparing the theory with the practice in the company without using numbers or calculations.

From the results of research and analysis by the author, it can be concluded that the PT SNM has not been fully successful in implementing good internal control procedures for granting loans and installment receipts from customers, where there are 3 elements of internal control that has not been applied to the maximum, ie labor competent and trustworthy, with the lines of authority and responsibility are clearly defined; adequate segregation of duties (segregation of duties), and healthy practices that should be run in the tasks and functions of each part of the organization.

Keyword: *Internal Control, Installment Lending, Revenue, Policy Management*

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dunia bisnis di era abad 21 ini memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi dalam segala sektor usaha yang ada. Setiap usaha dituntut untuk saling bersaing, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas guna memperoleh posisi yang mapan dan diakui secara global. lembaga pembiayaan saat ini sebagai penyalur dana yang dapat diharapkan oleh para pengusaha bahkan oleh pengusaha kecil dan bahkan oleh perseorangan. Berdasarkan keputusan menteri keuangan n.125/kmk.013/1988 tanggal 20 desember 1988 tentang tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan no. 1256/kmk.00/1989 tanggal 18 november 1989, serta Keputusan Menteri Keuangan no. 469/kmk.017/1995 tanggal 3 oktober 1995 maka lembaga pembiayaan saat ini terdiri dari 4 jenis kegiatan usaha, yaitu :

1. Sewa guna usaha (*leasing*)
2. Anjak piutang (*factoring*)

3. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
4. Kartu kredit (*credit card*)

Pengendalian intern yang baik terhadap sistem akuntansi dapat memudahkan kita mengetahui kesalahan-kesalahan atau penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Umumnya penyelewengan dilakukan pada saat proses pemberian pinjaman, penagihan dan penerimaan uang angsuran dari nasabah. Untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan tersebut, diperlukan suatu alat bantu pengendalian yang dikenal dengan "*internal control*".

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTENSI

2.1. Pengertian dan Istilah

Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi mengajarkan sistem pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen melalui berbagai sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi perusahaan, data keuangan diproses dalam berbagai catatan akuntansi, sampai dengan informasi disajikan dalam laporan keuangan. Selain itu, dalam sistem akuntansi diajarkan pula perancangan informasi akuntansi yang dibutuhkan manajemen atau pemakai lain, perancangan sistem pengolahan informasi untuk menghasilkan informasi akuntansi, dan perancangan berbagai unsur pengendalian intern yang melekat dalam sistem pengolahan informasi tersebut.

Pengertian Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern dapat dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas seperti dikemukakan oleh Aicpa adalah sebagai berikut: "pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan dan digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. *Internal check* merupakan suatu tehnik akuntansi untuk membuktikan kecermatan data akuntansi melalui perbandingan antara hasil kerja dua orang atau lebih mengenai suatu transaksi yang sama namun yang saling tidak mempengaruhi, karena mereka bekerja secara bebas (*independen*) dari lainnya.

Jadi dapat dilihat, *internal check* melindungi sumber-sumber perusahaan dari kecurangan-kecurangan dan ketidakefisienan serta memberikan kemudahan di dalam pelaksanaan pengambilan keputusan selanjutnya. ciri-ciri pokok dari *sistem pengendalian intern* meliputi :

- a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab- tanggung jawab fungsional secara tepat.
- b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
- d. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab.

Tujuan utama dari pada pengendalian intern itu adalah :

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Memajukan efisiensi di dalam operasi perusahaan.
4. Membantu menjaga ketaatan terhadap kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern bukanlah dimaksudkan untuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan. Sistem pengendalian intern yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas biaya yang layak. Dan walaupun terjadi kesalahan dan penyelewengan hal ini dapat diketahui dan diatasi dengan cepat.

Unsur sistem pengendalian intern

Unsur pokok yang harus ada dalam sistem pengendalian intern adalah

1. Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umum ditempuh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat antara lain :
 - a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - b) Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*).
 - c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lainnya.
 - d) Perputaran jabatan (*job rotation*).
 - e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.
 - g) Unit organisasi yang bertugas untuk mengecek aktivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

Pada perusahaan besar pengawasan secara langsung dari pimpinan terhadap bawahan telah sulit dilaksanakan. Dalam keadaan demikian, sistem pengendalian intern merupakan syarat mutlak apabila perusahaan ingin mencapai tujuannya secara efisien. Untuk itu diperlukan seseorang yang dapat membantu tugas tersebut, yaitu seorang *controller*. *Controller* adalah seorang manajer pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengamati perencanaan dan pengendalian pada perusahaan tersebut. tetapi pada perusahaan kecil, sering tugas pengendalian intern dilakukan langsung oleh pimpinan perusahaan atau cukup diserahkan kepada bagian pembukuan.

Latar belakang pembiayaan konsumen

Industri multi finance sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari data perkembangan nilai pembiayaan konsumen sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1997, yang mengalami peningkatan 1200% atau rata-rata peningkatan pertahun sekitar 240% terhadap tahun dasar 1992, dimana pada tahun 1992 hanya sebesar Rp 1.530,- milyar, tahun 1995 telah menjadi Rp 5.555,- milyar dan pada tahun 1997 telah menjadi Rp 18.287,- milyar. Berdasarkan data rekapitulasi perkembangan keadaan keuangan perusahaan pembiayaan tahun 1996 sampai dengan agustus 1998 (lihat lampiran a), aktivitas pembiayaan konsumen secara netto telah mengalami penurunan sebanyak 3.672.019,- juta dalam kurun

waktu 8 bulan pertama pada tahun 1998, di mana pada tahun 1997 tercatat Rp10.600.628,- sedangkan pada Agustus 1998 tercatat Rp 6.928.609,- juta atau turun sebanyak 34% selama 8 bulan. Bagi usaha jasa pembiayaan konsumen, kondisi penurunan ini dapat saja berlanjut terus apabila iklim usaha belum juga membaik, tingkat pengangguran masih tinggi, dan harga kebutuhan pokok masih mahal.

Pengertian pembiayaan konsumen

Unsur-unsur yang merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen sebagai berikut :

1. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).
2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup / keperluan rumah tangga misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.
3. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang akan diadakan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.
4. Hubungan kewajiban dan hak, di mana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen.
5. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
6. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terkait dengan ketentuan seperti financial lease.
7. Jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fiducia. Semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Di samping kedua jaminan yang disebutkan itu, pengakuan hutang (*promissory notes*) merupakan jaminan tambahan.

Pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen pada dasarnya melibatkan 3 (tiga) pihak sebagai berikut :

1) Perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur)

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas/ koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran / berkala oleh konsumen. Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen.

2) Konsumen (debitur / peminjam)

konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu :

- (1). Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara perusahaan dan konsumen.
- (2). Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian jaminan secara fiducia antara perusahaan dan konsumen.
- (3). Pemasok adalah perusahaan / pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek penelitian

Riset lapangan (*field research*), adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendapat keterangan langsung terhadap obyek yang akan diselidiki dengan tiga cara yaitu :

- a. Wawancara (*interview*)
Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pimpinan PT. SNM dan juga para karyawan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Riset per pustakaan
Yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku dan literatur yang penulis miliki dan buku-buku yang ada di per pustakaan.
- c. Magang
Yaitu pengumpulan data dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

3.2. Metode Analisa

Untuk penganalisaan lebih lanjut terhadap data yang sudah didapatkan agar nantinya dapat ditarik kesimpulan dan pengertiannya sebagai bagian akhir suatu penelitian maka akan dilakukan dengan metode analisa kualitatif yaitu suatu analisa terhadap masalah yang tidak menggunakan angka ataupun perhitungan

Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan hampir sama dengan mekanisme transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi untuk perorangan. Berikut ini akan kami kemukakan salah satu bentuk mekanisme transaksi pembiayaan konsumen, yaitu :

- a) *Tahap permohonan.* Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur biasanya sudah mempunyai usaha yang baik, dan / atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai.
- b) *Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan (survey).* Berdasarkan aplikasi dari pemohon, *marketing department* akan melakukan pengecekan atas kebenaran
- c) pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima.
- d) *Tahap pembuatan customer profile.* Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *marketing departement* akan membuat customer profile.
- e) *Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.* Marketing department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada kredit komite:

Keputusan Kredit Komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui, maka *marketing department* akan meneruskan tahap berikutnya.

Tahap Pengikatan

Berdasarkan Keputusan Kredit Komite, Biasanya Bagian Legal Akan Mempersiapkan Pengikatan Sebagai Berikut :

- a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Beserta Lampiran-Lampirannya.
- b. Jaminan Pribadi, Jika Ada.
- c. Jaminan Perusahaan, Jika Ada..

Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, *tahap pembayaran kepada supplier*.sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada *supplier*, kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- b. Pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh credit / legal administration department dengan menggunakan form check list document

Tahap penagihan / monitoring Pembayaran

- a. Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier / dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah penerimaan pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. *Collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah ditetapkan.

Pengambilan Surat Jaminan

Apabila Seluruh Kewajiban Debitur Telah Dilunasi, Maka Kreditur Akan Mengembalikan Kepada Debitur :Jaminan (Bpkb Dan / Atau Sertifikat Dan / Atau Faktur / Invoice),Dokumen Lainnya (Bila Ada).

4. HASIL CAN PEMBAHASAN

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dimana kualitas hasilnya sangat ditentukan oleh pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan pengguna jasa pembiayaan (seperti *dealer*), maka PT. SNM harus selalu meningkatkan pelayanannya untuk kepuasan bersama.pengendalian intern atas prosedur-prosedur yang ada akan berpengaruh positif bagi perusahaan apabila di pelaksanaannya memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik.

Analisis terhadap pengendalian intern atas prosedur pemberian pinjaman

Berikut adalah analisa terhadap prosedur pemberian pinjaman yang penulis dapat dari lapangan (khususnya bagi nasabah dalam kota):

1. Sering kali data aplikasi permohonan kredit dari calon konsumen yang diserahkan ke dealer belum lengkap, dan biasanya data yang kurang lengkap itu akan dilengkapi pada saat proses survey.
2. Didapati bahwa terkadang surveyor tidak melakukan kunjungan ke tempat bekerja, hanya mengunjungi rumahnya saja, atau juga bisa sebaliknya, hanya mengunjungi tempat bekerja, tanpa mengunjungi rumah si pemohon. Sering juga ditemukan bahwa

data hasil survey mengenai penghasilan / pekerjaan si pemohon bukan merupakan penghasilan / pekerjaan yang sesungguhnya.

3. Untuk aplikasi kredit dengan besar dp 40% ke atas, sering kali surveyor memberi konfirmasi approved ke dealer sehingga dealer berani untuk mengeluarkan unit kendaraan baru yang dipilih konsumen tanpa menunggu informasi approved dari bagian credit admin PT. SNM.

Dari analisis yang didapat terlihat adanya beberapa perbedaan antara prosedur pemberian pinjaman yang ada di bab 3 dengan prosedur pemberian pinjaman di lapangan. Perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam prosedur pemberian pinjaman (penjualan kredit) yang ada di bab 3, seharusnya dealer mengorder aplikasi permohonan kredit yang sudah lengkap ke PT. SNM. Dalam pelaksanaannya dealer sering kali mengorder aplikasi kredit yang belum lengkap ke PT. SNM. Hal ini kadang dapat dimaklumi oleh surveyor, sehingga pada saat di lapangan surveyor yang berusaha melengkapi data aplikasi tersebut.
2. Surveyor bertugas untuk mensurvei kelayakan calon nasabah.
3. Bagian casa melakukan scoring atas aplikasi kredit yang di-input oleh *credit admin*.

Analisis Terhadap Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan Angsuran

Berdasarkan analisa penulis di lapangan prosedur penerimaan angsuran PT. SNM adalah sebagai berikut :

1. Teller
 - a. Menanyakan identitas nasabah yang berupa nomor kontrak / nomor langganan / nama nasabah / nomor polisi kendaraan.
 - b. Melihat data pelanggan di komputer.
 - c. Melihat status nasabah, apakah *overdue* / tidak.
 - d. Meminta otorisasi bagian *collection* jika statusnya *overdue*.
 - e. Menerima pembayaran angsuran.
 - f. Memeriksa keaslian, kebenaran, dan keabsahan alat pembayaran nasabah. Alat pembayaran dapat berupa uang tunai / giro / cek.
 - g. Jika alat bayar tidak bermasalah maka kasir menerima dan menyimpan alat pembayaran tersebut.
 - h. Mengentry penerimaan angsuran ke komputer.
 - i. Mencetak kwitansi pembayaran dan / atau tanda terima sementara / tanda terima giro dan menyerahkan ke pelanggan.
2. Bagian *field collector* dapat menerima angsuran dari nasabah baik berupa giro / uang tunai. Dalam upaya membantu proses penerimaan angsuran maka perusahaan mengeluarkan kebijakan dimana bagian *field collector* dapat menerima angsuran dari nasabah baik berupa giro / uang tunai dan nasabah mendapatkan tanda terima sementara. Uang angsuran tersebut akan disetor ke kasir pada keesokan harinya dan kasir menyimpan slip pembayarannya. Maksud dan tujuan kebijakan tersebut memang baik namun ada kemungkinan angsuran tersebut dapat dipakai dulu (terjadi *lapping*) tanpa diketahui oleh perusahaan atau nasabah. Meskipun bagian *field collector* yang ada merupakan tenaga kerja yang cakap dan dapat dipercaya namun alangkah baiknya jika disertai adanya garis kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyaknya nasabah yang terlambat bayar disebabkan oleh bagian surveyor yang kurang selektif dalam mensurvey kelayakan calon nasabah yang mengajukan pemberian pinjaman / pembiayaan. Minimnya tindakan pengecekan yang dilakukan surveyor yang disebabkan oleh faktor kemalasan atau bisa juga dari faktor adanya uang tips dari si pemohon kredit membuat surveyor menjadi tidak mendapatkan hasil survey yang benar-benar obyektif, sehingga banyak nasabah yang sebenarnya kurang layak tetapi mendapatkan pemberian pinjaman (pembiayaan). Hal ini belum mencerminkan adanya pengendalian intern yang baik khususnya dalam hal praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
2. Proses penerimaan angsuran yang dilaksanakan PT. SNM belum sepenuhnya mencerminkan unsur pengendalian intern yang baik karena tidak disertai adanya garis kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas. Dimana banyaknya bagian (antara lain : *teller, field collector, admin. Collector, desk collector*) yang dapat menerima pembayaran angsuran dari nasabah sehingga memperbesar terjadinya penyelewengan.
3. Penerimaan angsuran baik giro maupun tunai dapat juga dilakukan oleh *field collector* sehingga memungkinkan terjadinya *lapping*.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka pada bagian ini akan dipaparkan beberapa saran yang dapat berguna bagi perusahaan :

1. Perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan proses survey kelayakan calon konsumen, mengingat hal itu adalah bagian awal yang berpengaruh terhadap disetujui atau tidaknya pemberian pinjaman / pembiayaan. Harus ada penerapan sanksi yang tegas terhadap surveyor yang bersalah atau yang merugikan perusahaan (praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi).
2. Perlu adanya pemisahan yang jelas dan tegas dalam hal tugas dan tanggung jawab khususnya terhadap pelaksanaan tugas di lapangan khususnya pada bagian *teller, field collector, admin. Collector, desk collector* {a. Tenaga kerja yang kompeten dan dapat dipercaya, disertai adanya garis kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas. B. Pemisahan tugas yang memadai (*segregation of duties*)}.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke, 1991. *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu, Buku Ii*, Salemba Empat, Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 1991. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur Dan Metode*, Bpfe, Edisi Kelima, Yogyakarta.
- Baridwan, Zaki. 1991. *Sistem Pengendalian Intern*, Bpfe, Yogyakarta.

- Hadibroto, Oemar Witarsa, 1984. *Sistem Pengawasan Intern*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hartadi, Bambang. 1990. *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen Dan Audit*, Penerbit BPFE, Edisi I, Yogyakarta.
- Heckert, James D. Wilson dan John B. Campbell, *Controllershship - Tugas Akuntan Manajemen*, Erlangga, Edisi Ketiga, 1990.
- Ibnu Syamsi, *Efisiensi, Sistem, Dan Prosedur Kerja*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1994. *Standar Akuntansi Keuangan Buku I*, Penerbit Salemba Empat.
- Mulyadi. 1993. *Sistem Akuntansi*, STIE YKPN, Edisi Ketiga, Yogyakarta.
- Rahma, Budi. 2002. *Multi Finance*, C.V. Novindo Pustaka Mandiri, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Subekti. & Rjitosudibio, 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-16.
- Tuanakota, Theodorus M., 1982. *Auditing, Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi Ketiga.

Sengaja dikosongkan